

PELAKSANAAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Mukhamil Irsyad Merlion

Dosen Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli SD, M.Si

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru 28293, Telp/fax (0761)63277

Abstract

Mukhamil Ershad The Merlion. 1201134564. Implementation of the 12-year compulsory education Program in the city of Pekanbaru. Supervisor: Dr. H. Zaili Rusli, SD, M.Si.

Education is a basic need of the main and important in our lives. Access to education is one of the most important lines in boosting development in all aspects of life, in particular towards the development of intelligence and skills in community in accordance with Act No. 20 of 2003 on the Organization of education. Follow up on Act No. 20 of 2003, the Central Government made compulsory, with the compulsory education renders justice, can be enjoyed throughout the kids at school age in this country. In realizing this compulsory, the Government of the city of Pekanbaru develop equitable access to quality primary education and nine years and a 12-year compulsory education stub supported by means of an adequate infrastructure and energy professional education as well as the improvement of the governance of the education scale national standards.

In this research the concept of theory used the author refers to the theory of management according to G.R. Terry, stating that management is the process of planning, organizing, implementing and monitoring. This research uses descriptive method using qualitative data. Then in the collection of data the author uses data collection techniques include observation, interview and documentation.

Based on the research results obtained that the implementation of a 12-year compulsory education program in the city of Pekanbaru has not done due to the large number of constraints still faced in the process of its implementation. Pekanbaru City Government should have special rules that define the execution of this program.

Keywords: *Implementation, Management, Compulsory Education.*

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang penting dan utama dalam kehidupan kita. Pendidikan juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen Bab X A Hak Asasi Manusia Pasal 28C yang berbunyi :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

Dan UUD 1945 Amandemen Bab XIII Pendidikan Dan Kebudayaan Pasal 31, ayat 1-5 yang berbunyi :

“(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-

nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Oleh karena itu, hak setiap anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Akses masyarakat terhadap pendidikan merupakan amanah yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan salah satu komponen terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, dalam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan kinerja pendidikan yaitu gabungan angka partisipasi kasar (APK) jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi digunakan sebagai variabel dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersama-sama dengan variabel kesehatan dan ekonomi.

Menindaklanjuti UU No. 20 Tahun 2003 tersebut, Pemerintah Pusat membuat program wajib belajar. Dalam hal ini adalah kewajiban Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dengan program wajib belajar tersebut menjadikan pendidikan berkeadilan, bisa dinikmati seluruh anak-anak di usia sekolah di negara ini.

Dalam peningkatan sumber daya yang berkualitas dan dalam mengantisipasi pemikiran para orangtua untuk menghentikan pendidikan anak hanya hingga

tingkat SMP, Pemerintah Provinsi Riau mensosialisasikan rencana pemuatan program yang mampu mendukung anak untuk terus mendapatkan pembelajaran yang semestinya di sekolah hingga tingkat SMA dengan program wajib belajar 12 tahun yang di sampaikan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013. Sosialisasi tersebut kemudian di buktikan dengan dibuat Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan dengan anggaran 20 persen dari APBN.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memuluskan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini. Pertama, pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik dan benar kepada murid. Maksudnya wajib belajar 12 tahun harus didukung dengan fasilitas di sekolah misalnya terkait penyediaan ruang kelas, sarana dan prasarana sekolah serta kualitas guru dan pendidik.

Selama ini kita selalu dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana, baik sekolah yang tidak layak pakai dan kualitas pendidik yang tidak sesuai harapan. Kedua, pemerintah tidak hanya menjamin anak – anak bangsa belajar 12 tahun, namun juga harus menjamin tidak ada lagi pungutan liar di sekolah. Anggaran 20 persen dari APBN rasanya cukup mampu merevolusi semua sektor pendidikan yang terbengkalai, jangan sampai memberatkan para orang tua siswa. Terlebih untuk keluarga siswa yang kurang mampu, pungutan liar tersebut dapat memicu orang tua siswa untuk segera menghentikan

pendidikan anaknya karena tak sanggup untuk membayar pungutan.

Penduduk Kota Pekanbaru memiliki tingkatpartisipasi pendidikan yang cukup baik. Ini dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia7-12tahun (usia ideal menduduki bangku SD) yang mencapai 98,34 dan APS penduduk usia13-15 tahun (usiaideal menduduki bangku SLTP) yangmencapai 97,48.Sementaraitu pada pendudukusia 16-18tahun (usiaideal menduduki bangkuSLTA)partisipasi sekolahnyahanya 76,04.

Tabel 1.3
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekanbaru

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekanbaru 2014/2015 (%)	
	APM	APK
SD/ MI	95.70	115.08
SMP/MTs	81.53	97.69
SMA/MA	68.63	87.83

Sumber data: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015

Berdasarkan tabel 1.3 diatas dapat kita lihat bahwa yang berpartisipasi dalam dunia pendidikan di Kota Pekanbaru ini masih sedikit berdasarkan data yang

diperoleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.

Tabel 1.5
Anggaran Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru
Tahun 2015 dan 2016

APBD	
Tahun 2015	Tahun 2016
Rp. 225.953.56 4.652	Rp. 196.119. 452.590

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2015/2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran untuk menunjang program wajib belajar ini cukup namun masih tidak tepat sasaran dalam penggunaannya sehingga masih ditemukannya anak putus sekolah maupun sarana dan prasarana yang tidak memadai.

Berdasarkan dari uraian fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini mengenai kondisi ini terhadap program wajib belajar di Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “ **Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru?
- 2) Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaa

n program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam ilmu administrasi pada umumnya, dan administrasi publik mengenai pengawasan represif dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan. Informasi dan referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan informasi atau sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru.

D. Konsep Teori

1. Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni management, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata manajemen sendiri berasal dari Bahasa Italia, maneggio, yang diadopsi dari Bahasa Latin managiare, yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan (**Samsudin, 2006: 15**).

Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (**Hasibuan, 2001: 3**).

Menurut **George R. Terry** dalam **Manullang (2012:8)**, prinsip-prinsip manajemen adalah sebagai berikut :

1) Perencanaan (Planning)

Fungsi perencanaan (planning) merupakan suatu kegiatan dimana di dalam kegiatan ini terdapat proses pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan yang membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan penuh keyakinan untuk mencapai hasil-hasil yang dikendaki. Suatu perencanaan yang baik, haruslah mengandung formulasi 5W + 1H yaitu What (apa), Who (siapa), Where

(dimana), When (kapan), Why (mengapa), How (bagaimana). Disamping itu perencanaan yang baik haruslah terdapat unsur-unsur yaitu adanya penyusunan rencana kerja dan penerapan tujuan.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Organisasi merupakan suatu kegiatan dalam menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Didalam suatu organisasi terdapat beberapa unsur yaitu adanya perincian kerja, penempatan dan pembagian tugas.

3) Pelaksanaan (Actuating)

Menurut **Badrudin (2013:152)**, Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenaan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Pelaksanan atau penggerak merupakan fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar maka diperlukan beberapa hal yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan tindakan/pekerjaan yaitu adanya :

- a. Kepemimpinan
- b. Motivasi dan
- c. Komunikasi

4) Pengawasan (Controlling)

Menurut **G.R Terry** dalam **Syafiie (2006:50)**, Pengawasan sendiri merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan, pengawasan dan Pe-ngendalian. Tidak saja berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu pembangunan perumahan itu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun juga untuk membuat penyesuaian-penyesuaian jika diperlukan, sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini proses pengawasan ada tiga tahap yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

2. Program

Sujianto (2008:32) mendefenisikan program adalah suatu komplek dari tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, peraturan-peraturan, pemberian tugas dan langkah-langkah yang harus diambil, sumber-sumber yang harus dimanfaatkan dan elemen-elemen lain yang diperlukan

untuk melaksanakan arah dan tindakan tertentu.

Menurut **Umar (2005:15)** program atau program-program disusun dengan mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Program pada hakikatnya adalah kumpulan proyek, dalam hal ini proyek bisa disakan dengan program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan. Suatu program adalah kumpulan proyek yang berhubungan telah dirancang untuk melaksanakan kegiatan yang harmonis dan secara integritas untuk mencapai sasaran kebijaksanaan tersebut secara keseluruhan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menyajikan data-data dan informasi yang diperoleh dari penelitian di lapangan tersebut dengan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Pekanbaru. Informasi tersebut di dapat berdasarkan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Pekanbaru. Dari hasil terkumpul sejumlah data yang di perlukan tentang pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun untuk melaksanakan program tersebut.

A. Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Pekanbaru

Pendidikan merupakan investasi yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia di masa

depan. Dengan pendidikan manusia bisa dilatih dalam ketrampilan maupun kecerdasan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang semakin kompleks. Indikator yang penting dalam menilai sumber daya manusia adalah pendidikan, artinya semakin baik taraf pendidikan maka semakin baik pula sumber daya manusia tersebut. Dengan pendidikan orang yang bodoh atau tidak tahu bisa menjadi pintar, artinya dengan pendidikan terjadi proses transfer knowledge. Oleh karena itu pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia.

Pelaksanaan program wajib belajar 12 Tahun di Kota Pekanbaru untuk Pendidikan merupakan investasi yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan manusia di masa depan. Dengan pendidikan manusia bisa dilatih dalam ketrampilan maupun kecerdasan untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan yang semakin kompleks. Indikator yang penting dalam menilai sumber daya manusia adalah pendidikan, artinya semakin baik taraf pendidikan maka semakin baik pula sumber daya manusia tersebut. Dengan pendidikan orang yang bodoh atau tidak tahu bisa menjadi pintar, artinya dengan pendidikan terjadi proses transfer knowledge. Oleh karena itu pendidikan adalah suatu proses yang sangat penting dalam peningkatan sumber daya manusia.

Selanjutnya penulis akan menjelaskan masing – masing indikator tersebut menurut jawaban dari wawancara terhadap informan yang telah di lakukan sebelumnya

dalam penelitian ini, untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator – indikator tersebut di atas. Dari pelaksanaan diatas terdapat beberapa kegiatan dalam masing – masing pelaksanaan yaitu, sebagai berikut:

1. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama yang harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melaksanakan aktivitas dinas sehubungan dengan akan pencapaian tujuan organisasi dinas adalah dengan membuat perencanaan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah merupakan fungsi kedua dalam Manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan

penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber, dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Struktur Organisasi dapat didefinisikan sebagai mekanisme-mekanisme formal organisasi diolah. Struktur organisasi terdiri atas unsur spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi atau desentralisasi dalam pembuatan keputusan dan ukuran satuan kerja.

Pengorganisasian yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kota pekanbaru sudah jelas dan terarah dengan adanya (Tupoksi) tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari adanya struktur organisasi dinas yang ada di kantor dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Proses pengorganisasian adalah proses suatu pengelompokan, yakni disamping pengelompokan orang-orang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, juga akan diikuti sertakan pula dengan pengelompokan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas tersebut.

3. Pelaksanaan (Actuating)

Pelaksanaan Menurut Westra adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Dinas pendidikan kota pekanbaru sebagai pelaksana dalam menjalankan program wajib belajar ini terus berupaya dalam memberikan informasi terhadap pentingnya pendidikan guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi terhadap sumber daya manusia yang akan menjadi aset dalam pembangunan bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu masyarakat harus mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, melalui pendidikan berkualitas, murah, dan terjangkau melalui program wajib belajar 12 tahun.

4. Pengawasan (Controlling)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi. Apabila terjadi penyimpangan di mana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing sesuai rencana semula.

Maksudnya, pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penent

uan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana selaras dengan standar (ukuran).

Pada dasarnya pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan dinas pendidikan kota pekanbaru diharapkan dapat membantu dalam pelaksanaan program wajib belajar bisa berjalan efektif dan efisien. Melalui pengawasan, dapat terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan dan evaluasi sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan yang dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasi tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan.

B. Faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses implementasi yang dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses implementasi tersebut dapat bersumber pada internal, yang

melakukan implementasi dan yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari implementasi antara lain sebagai berikut :

1. Keadaan Sosial dan Ekonomi

Orang tua yang tinggal dalam masyarakat berpendidikan, akan mendorong untuk menyekolahkan anaknya sebaiknya orang tua yang tinggal dalam masyarakat yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah akan mempengaruhi pula untuk menyekolahkan anaknya. Tempat tinggal dalam masyarakat berpendidikan rendah dapat mempengaruhi pula rendahnya kesadaran orang tua tentang arti penting bagi anak.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh sebab itu dalam implementasi suatu kebijakan diperlukannya sumber daya manusia yang berkualitas agar program tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif dan juga efisien. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini sumber daya manusia masih belum mencukupi yang mengakibatkan program wajib belajar tidak terlaksana dengan baik.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis tertarik untuk menyimpulkan kesimpulan dengan permasalahan yang diteliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengemukakan kesimpulan bahwa pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota Pekanbaru ini belum terlaksana dikarenakan masih banyaknya kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.
2. Adapun indikator yang menyebabkan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota Pekanbaru sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, belum maksimalnya perencanaan yang dilakukan dinas pendidikan untuk mencapai tujuan program tersebut, dikarenakan dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala-kendala yang ditemui dilapangan. Selain itu belum adanya peraturan khusus dari pemerintah kota pekanbaru dalam memfokuskan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di kota pekanbaru.
 - b. Pengorganisasian, untuk mewujudkan program wajib belajar

12 tahun ini pengorganisasian cukup penting dalam mengatur berbagai macam kegiatan untuk menjalankan program wajib belajar tersebut. Selain itu juga diperlukannya sinergisitas peran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta memberikan informasi yang dapat dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

- c. Pengawasan, instansi yang terkait dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini berperan penuh untuk mengawasi segala aspek untuk mewujudkan tujuan program tersebut, mulai dari pembuat kebijakan, pelaku kebijakan, sasaran kebijakan maupun seluruh masyarakat.
3. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kota pekanbaru ini sebagai berikut:
 - a. Sosial ekonomi masyarakat, masih adanya anak putus sekolah yang dikarenakan keadaan sosial ekonomi orang tuanya, dimana sang anak lebih memilih

- bekerja untuk membantu ekonomi orang tua.
- b. Sumber daya, dilihat dari sumber daya yang dimiliki Kota Pekanbaru dalam hal ini anggaran maupun sarana dan prasarana dinilai masih kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Agar pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini dapat berjalan dengan maksimal maka pemerintah Pekanbaru harus memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang tujuan program wajib belajar 12 tahun ini dan memberikan sanksi terhadap sekolah dan masyarakat yang melaksanakannya
- b. Sebelum melaksanakan program wajib belajar pemerintah dan pihak sekolah harus menempatkan dan melakukan pemerataan tenaga pengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya, selain itu pemerintah juga wajib pro-aktif dalam mendata anak-anak usia sekolah tetapi tidak bersekolah dikarenakan kondisi sosial dan ekonomi keluarganya. Kemudian pemerintah harus menyediakan fasilitas – fasilitas pendukung agar program wajib belajar 12

tahun ini berjalan dengan baik.

- c. Agar program wajib belajar 12 tahun ini dapat terselenggara dengan baik sesuai tujuannya maka pemerintah hendaknya lebih meningkatkan lagi indikator – indikator dalam melaksanakan suatu program tersebut terhadap pihak masyarakat agar tidak ada lagi ditemukannya anak – anak usia sekolah yang tidak mengenyam pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, Malayu 2001. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik “Konsep Teori dan Praktik”. Alfabeta: Riau.
- Umar, Husein. 2005. Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen Cetakan keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Terry G.R. 2006. Dasar-Dasar Manajemen. PT. Renika Cipta